

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) Pengaturan anak sebagai pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi di Indonesia; 2) Untuk mengetahui Bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi; adapun masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana pengaturan anak sebagai pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi di Indonesia; 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perundang-undangan, dan Pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dalam hukum positif Indonesia saat ini anak yang berhadapan dengan hukum akan diproses menggunakan hukum acara anak yang terdapat dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk anak yang belum berumur genap 12 tahun jika melakukan tindak pidana maka ada dua pilihan yang diambil oleh penegak hukum yakni mengembalikan anak kepada orang tuanya atau mengikutsertakan anak dalam program Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan untuk anak yang telah berumur genap 12 tahun maka anak dapat diajukan kemuka persidangan namun prosedur sidangnya berbeda dengan orang dewasa dimana pada saat sidang, sidang tertutup untuk umum, hakim tunggal, dan tidak boleh menggunakan baju dengan atribut kedinasan. 2) Belum adanya lembaga yang dapat menangani anak yang menjadi pelaku tindak pidana pornografi sehingga anak yang mengalami permasalahan pornografi hanya dapat diproses secara hukum pidana tanpa ada penanganan lebih jauh untuk mengobati anak dari kecanduan konten pornografi dan menjadi pelaku pornografi sehingga tujuan pemerintah untuk melindungi anak dari dampak buruk konten pornografi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang pornografi tidak terealisasi hingga sekarang Saran 1) Penanganan anak yang mengalami kecanduan konten pornografi tidak perlu diselesaikan melalui proses peradilan namun cukup secara nonlitigasi. 2) Harus diciptakan suatu lembaga baru yang benar-benar mengurus permasalahan mengenai penanganan anak yang mengalami kecanduan konten pornografi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Anak, Konten Pornografi

ABSTRACT

This research aims: 1) To determine the regulation of children as perpetrators of the crime of distributing pornographic content in Indonesia; 2) To find out how the law is enforced against children as perpetrators of criminal acts of distributing pornographic content; The problems in this research are: 1) How are children regulated as perpetrators of the crime of distributing pornographic content in Indonesia; 2) How to enforce the law against children as perpetrators of criminal acts of distributing pornographic content. The research method used is the normative juridical research method and the approaches used are the Conceptual Approach, Legislative Approach and Case Approach. Analysis of the legal materials used in this research was carried out using descriptive analytical research methods, the data analysis used was a qualitative approach to primary and secondary data. The results of the research show that 1) In Indonesian positive law, currently children who are in conflict with the law will be processed using the juvenile procedural law contained in the Juvenile Criminal Justice System Law. For children who are not even 12 years old if they commit a criminal act, there are two choices taken by them. law enforcers, namely returning children to their parents or involving children in the Social Welfare Implementation Institution program and for children who have reached the age of 12, children can be brought before the court, but the trial procedure is different from that of adults, where at the time of the hearing, the hearing is closed to the public, the judge single, and may not wear clothes with official attributes. 2) There is no institution that can handle children who are perpetrators of criminal acts of pornography so that children who experience pornography problems can only be processed under criminal law without any further treatment to treat children from being addicted to pornographic content and becoming perpetrators of pornography so that the government's aim is to protect children from The bad impact of pornographic content as stated in the pornography law has not been realized until now. Suggestions 1) Handling children who are addicted to pornographic content does not need to be resolved through a judicial process but is sufficient in a non-litigation manner. 2) A new institution must be created that really deals with problems regarding the treatment of children who are addicted to pornographic content.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Children, Pornographic Content